

Laporan Hasil Audit Umum

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK CABANG TANJUNG PRIOK

Distribusi Laporan Hasil Audit:

- ☐ **Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok**
- ☐ **GM PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Tanjung Priok**
- ☐ Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok c.q Komite Audit
- ☐ Para Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok
- ☐ Arsip

Kepada Yth.

Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok

Perihal : Laporan Hasil Audit Umum PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) Cabang Tanjung Priok

Kami telah melakukan audit umum PT PTP Cabang Tanjung Priok untuk periode 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021. Proses audit tersebut dilaksanakan dari tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 26 Maret 2021, dengan hasil audit sebagaimana kami sajikan pada laporan ini.

Tujuan audit, ruang lingkup audit dan prosedur audit yang telah dilakukan kami rangkum dalam Ringkasan Eksekutif dari laporan ini.

Seluruh hasil audit dan rekomendasi telah kami bahas dan disepakati oleh auditi dan *Person In Charge* (PIC) terkait.

Kami mengucapkan terima kasih kepada General Manager PT PTP Cabang Tanjung Priok beserta staf atas kerjasamanya selama pelaksanaan audit.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,

E. Setyo Budi Nugroho

SVP Satuan Pengawasan Internal

	Hal
□ Ringkasan Eksekutif	4
□ Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit	5
1. Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Nota	5
2. Penetapan dan Approval UPER	5
3. Pengelolaan Piutang dan Kewajiban Penyampaian Faktur Pajak	6
4. Nota-nota Manual	6
5. Data Penggunaan Gantry Luffing Crane Kurang Akurat	7
6. Pekerjaan Peningkatan Jalan Akses Inggom	7
7. Penerapan Imbalan Jasa Alat	8
8. Evaluasi Kegiatan Operasional Bongkar Muat Belum Dilaksanakan	8
9. Aplikasi SIM-Barang Perlu Disempurnakan.....	9
□ Ringkasan Hal-hal yang Perlu Diperhatikan	10
1. Pelaksanaan Monitoring Realisasi Bongkar Muat	10
2. Sewa Lahan untuk <i>Site Office</i> Mitra	10
3. Adanya Kendala dalam Pengoprasian NPKTOS.....	10
4. Alat Bantu Bongkar Muat dalam Kondisi Rusak.....	10
5. Kepatuhan Penggunaan Alat Perlindungan Diri (APD) di Area Lini I	11
6. Training untuk Pekerja yang Baru Menggunakan Sistem.....	11
7. Tidak Dilaporkannya User Id Pekerja yang Sudah Dimutasi.....	11
□ Lampiran:	
1. Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit	12 - 32
2. Rincian Hal-hal yang Perlu Diperhatikan	33 - 35
3. Definisi Istilah	36

Tujuan Audit

1. Memberikan penilaian atas penerapan prinsip-prinsip pokok pengendalian internal terhadap pengelolaan PT PTP Cabang Tanjung Priok yang mencakup pengelolaan aspek-aspek finansial/komersial, operasional dan legal/ governance.
2. Memberikan penilaian atas pelaksanaan SOP perusahaan untuk meyakinkan bahwa SOP telah menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan SOP yang ada telah memadai.
3. Memberikan rekomendasi perbaikan atas kebijakan pengelolaan PT PTP Cabang Tanjung Priok yang mencakup aspek Tata kelola (Governance), Manajemen Risiko (Risk), dan Pengendalian internal (Control).

Ringkasan Prosedur Audit yang Dilakukan

Audit kami laksanakan melalui prosedur berikut:

1. Melakukan reviu atas dokumen/administrasi perusahaan, melaksanakan observasi visual, melakukan wawancara/konfirmasi serta pemeriksaan fisik untuk menilai ketaatan terhadap peraturan perusahaan
2. Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap upaya yang dilakukan manajemen Cabang dalam pencapaian sasaran/target perusahaan
3. Melakukan telaah atas aturan, pedoman dan SOP yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Cabang untuk dilakukan penyempurnaan

Ruang Lingkup Audit

Ruang lingkup audit :

- Ruang lingkup audit adalah seluruh aktivitas pengelolaan PT PTP Cabang Tanjung Priok yang meliputi pengelolaan aspek-aspek finansial, komersial, operasional dan legal/ governance

Periode yang diaudit :

- Periode yang diaudit adalah tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021

Opini Audit

Berdasarkan audit ini kami memberikan opini terhadap Pengelolaan PT PTP Cabang Tanjung Priok adalah :

2 – Some Improvement Needed (Diperlukan beberapa perbaikan)

Terdapat beberapa kelemahan kontrol yang teridentifikasi. Namun secara umum, kontrol yang ada sudah cukup, sesuai, efektif, dan memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

5

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
1.	<p>Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Nota</p> <p>Berdasarkan aplikasi SIM-Barang untuk periode 1 Januari s.d 22 Maret 2021, diperoleh data masih terdapat 48 pranota senilai Rp 8,15 Milyar yang belum terbit invoicenya dengan tanggal terlama adalah 5 Januari 2021. Selain itu, terdapat 147 Nota dengan nilai Rp 19,39 Milyar yang belum terbit JKM dengan status <i>belum lunas</i> dikarenakan PBM Mitra belum menyampaikan faktur pajak PPN sehingga masih tercatat sebagai piutang</p> <p>Kondisi tersebut disebabkan oleh kurangnya optimalnya pengendalian atas penerbitan nota, ketergantungan dengan mitra (persetujuan, faktur pajak, dll) serta belum diterapkannya klausul SLA secara tegas</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan pengawasan terhadap penerbitan nota b. Mempercepat penerimaan faktur pajak dari Mitra sebagai dasar penagihan c. Menerapkan klusul SLA dengan mitra secara tegas dan konsisten 	<p>GM Cabang Tanjung Priok</p> <p>31 Juli 2021</p>	1
2	<p>Penetapan dan Approval UPER</p> <p>Berdasarkan Laporan Nota RBM terdapat beberapa nota gagal mengirim invoice (gagal <i>release</i>) periode tahun 2020 dan 2021 yang disebabkan antara lain oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kekurangan dana sebesar Rp 544.004.061,00 yang tidak dapat ditarik dari rekening <i>autocollection</i> karena nominal yang di-<i>hold</i> lebih kecil dari jumlah tagihan. b. Penetapan UPER berdasarkan pengajuan permintaan pelayanan jasa dari Mitra namun komitmen atas pemenuhannya tidak dipantau c. Bagian Rendal Operasi tetap memproses tahapan kegiatan selanjutnya (<i>approval upper</i>) meskipun dana yang di-<i>hold</i> tidak mencukupi atau gagal <i>release invoice</i> dan mitra belum/tidak menyetor kekurangan dana. d. Tidak diterapkannya aturan yang menyatakan bahwa pelayanan mitra akan ditangguhkan sebelum menyelesaikan kewajiban atas kegiatan sebelumnya 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan sanksi tegas misalnya menunda pelayanan atas kekurangan penyetoran UPER serta melarang melakukan kegiatan di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok sebelum seluruh kewajiban dilunasi. b. Menambahkan modul dalam SIM-Barang agar sebelum UPER muncul <i>alert</i> (peringatan) dilunasi tidak mungkin dilakukan tahapan kegiatan selanjutnya (<i>system locking</i>) 	<p>GM Cabang Tanjung Priok</p> <p>31 Juli 2021</p> <p>VP Sistem Informasi</p> <p>31 Juli 2021</p>	1

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
3.	<p>Pengelolaan Piutang dan Kewajiban Penyampaian Faktur Pajak</p> <p>Berdasarkan audit kami ditemukan bahwa pemberlakuan klausul pada SLA yang menyatakan bahwa Mitra diwajibkan menyampaikan Faktur Pajak Standar/e-faktur dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah nota terbit belum dilaksanakan sepenuhnya, sehingga masih dijumpai lambatnya penyerahan faktur pajak dari mitra. Dampak dari kelambatan penyerahan faktur pajak ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> Saldo piutang dicatat terlalu besar (overstated), karena dicatat sebesar 100% padahal piutang PT PTP hanya sebesar sharing (40 – 60%) Sebaliknya PPN Keluaran dibayar terlalu besar karena dibayar 100% padahal beban PT PTP hanya sebesar sharing (40-60%) 	<ol style="list-style-type: none"> Mendesak Mitra mempercepat penyerahan faktur pajak dan mengenakan denda pajak dan/atau menunda pelayanan jika faktur pajak tidak diterima Meminta komitmen seluruh stakeholder perusahaan untuk melaksanakan klausul SLA secara tegas dan konsisten Menolak segala intervensi dari pihak manapun terkait penerapan klausul SLA tersebut 	<p>GM Cabang Tanjung Priok</p> <p>31 Desember 2021</p>	2
4.	<p>Nota-nota Manual</p> <p>Dari audit kami terhadap penerbitan nota ditemukan masih adanya nota-nota manual yakni nota atas pembayaran kewajiban lumpsum berdasarkan Berita Acara Perjanjian Lumpsum Tahun 2020/2021. Nota-nota lumpsum tersebut diterbitkan berdasarkan nota dinas dari Cabang Tanjung Priok kepada Divisi Treasury Kantor Pusat. Selanjutnya Divisi Treasury membuat atau meneruskan permintaan pembuatan nota tersebut ke CSC IPC.</p> <p>Kondisi tersebut disebabkan oleh belum diberikannya akses penerbitan nota manual di aplikasi SIMKEU kepada Cabang Tanjung Priok serta belum diperbaruinya prosedur penerbitan nota yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan status Cabang sebagai Cabang mandiri.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan akses penerbitan nota manual di aplikasi SIMKEU kepada Cabang Tanjung Priok Memperbarui prosedur penerbitan nota yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan status Cabang 	<p>VP Sistem Informasi,</p> <p>31 Desember 2021</p> <p>GM Cabang Tanjung Priok</p> <p>31 Desember 2021</p>	2

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

7

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
5.	<p>Data Penggunaan Gantry Luffing Crane Kurang Akurat</p> <p>Dari audit terhadap penggunaan dan pendapatan GLC ditemukan bahwa datanya kurang akurat yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> Terdapat kegiatan bongkar muat tanpa penggunaan GLC, meskipun sudah ada ketentuan penggunaan GLC minimal 25% dari total tonage bongkar muat. Terdapat data penggunaan GLC melebihi jumlah total bongkar muat yang dicatat pada kegiatan bulan Januari dan Februari 2021. <p>Kondisi tersebut disebabkan lemahnya pengawasan, kurang telitinya petugas dalam membuat laporan serta belum adanya aturan terhadap pemberlakuan uper, minimum <i>charge</i> dan kondisi <i>optional</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan reviu berjenjang terhadap kegiatan pencatatan data produksi dan pendapatan GLC. Melakukan <i>coaching</i> kepada petugas administrasi untuk kegiatan pencatatan, pengumpulan dan pelaporan. Mengusulkan kepada Direktorat Komersial untuk meratifikasi dan/atau menetapkan aturan tentang penggunaan GLC di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok 	<p>GM Cabang Tanjung Priok</p> <p>31 Desember 2021</p>	2
6.	<p>Pekerjaan Peningkatan Jalan Akses Inggom</p> <p>Dari hasil observasi lapangan ditemukan adanya pekerjaan peningkatan jalan akses dari dan menuju areal Inggom yang dilaksanakan oleh IPC Cabang Tanjung Priok yang belum selesai. Semula dijadwalkan selesai pada Juli 2021 namun diperkirakan pekerjaan tersebut akan berakhir pada bulan September 2021.</p> <p>Dampak dari pekerjaan tersebut antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> Tidak dapat dilaluinya akses menuju dermaga dan lapangan Inggom khususnya muatan besar <i>heavy duty equipment</i> dan muatan yang diangkut menggunakan <i>low bed truck</i> Beberapa perusahaan yang sebelumnya mengerjakan kegiatan bongkar muat alat-alat berat dan project cargo di Dermaga Inggom mengalihkan kegiatannya ke dermaga lain. Penurunan pendapatan sejak dimulainya pekerjaan tersebut mencapai 50% 	<ol style="list-style-type: none"> Membuat kajian dampak pekerjaan peningkatan jalan Industri terhadap produksi dan pendapatan. Mengajukan/menyampaikan surat permohonan penyesuaian Nilai Kerjasama dan Nilai Kontribusi Bagi Hasil (<i>sharing</i>) kepada IPC cabang Tanjung Priok. 	<p>GM Cabang Tanjung Priok</p> <p>31 Desember 2021</p>	2

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
7.	<p>Penerapan Imbalan Jasa Alat</p> <p>Dari hasil wawancara dan kunjungan lapangan didapat tongkang yang bekerja dengan menggunakan kran darat yang sebelumnya terparkir di wilayah PT PTP Cabang Tanjung Priok, namun alat tersebut belum dikenakan biaya imbalan jasa alat atau biaya penumpukan.</p> <p>Hal itu disebabkan oleh karena belum adanya aturan juklak/juknis sebagai pedoman pengenaan tarif imbalan jasa alat diluar skema Perjanjian Kerjasama dengan Mitra</p>	<p>a. Menginventarisasi peralatan milik perusahaan penyedia alat/vendor di luar skema perjanjian untuk dibuatkan perjanjian ataupun Berita Acara imbalan jasa alat.</p> <p>b. Membuat aturan/dasar penagihan besaran tarif imbalan jasa alat bagi mitra/vendor di luar skema perjanjian.</p>	<p>GM Cabang Tanjung Priok 31 Desember 2021</p> <p>VP Komesial 31 Desember 2021</p>	<p>2</p> <p>2</p>
8	<p>Evaluasi Kegiatan Operasional Bongkar Muat Belum Dilaksanakan</p> <p>Dari keterangan petugas, Cabang Tanjung Priok belum melaksanakan evaluasi kegiatan operasional bongkar muat sejak penetapan tambat hingga kapal selesai kegiatan bongkar muat (alokasi waktu, gang buruh, TGH, jumlah alat, dll).</p> <p>Evaluasi kegiatan bongkar muat belum dilaksanakan baik untuk kapal yang dikerjakan sendiri oleh PT PTP Cabang Tanjung Priok maupun kegiatan bongkar muat yang dilaksanakan oleh PBM Mitra.</p> <p>Sesuai prosedur Perencanaan dan Persiapan Pengendalian Operasi kegiatan evaluasi dilaksanakan oleh DGM Bongkar Muat melalui WL.1/COP/COP/01/01</p>	<p>a. Membuat evaluasi kinerja bongkar muat sesuai SOP yang berlaku setiap selesai kegiatan bongkar muat yang divalidasi secara berjenjang.</p> <p>b. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan SOP yang berlaku.</p>	<p>GM Cabang Tanjung Priok 31 Desember 2021</p>	<p>2</p>

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

9

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
9.	<p><i>Aplikasi SIM-Barang Perlu Disempurnakan</i></p> <p>Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada bagian pembuatan pranota di Cabang Tanjung Priok , didapati beberapa hal diantaranya: Pada sistem SIM-Barang terdapat pilihan satuan/kemasan yang belum di default berdasarkan jenis komoditinya. Begitu juga dengan status Mengganggu dan tidak Mengganggu juga belum di default, sehingga ada kemungkinan terjadi kesalahan input pada satuan/kemasan dan status barang mengganggu dan tidak mengganggu.</p>	<p>Berkoordinasi dengan Divisi Sistem Informasi untuk melakukan penyempurnaan SIM-Barang agar dapat digunakan lebih optimal.</p>	<p>GM Cabang Tanjung Priok & VP Sistem Informasi 31 Desember 2021</p>	2

Ringkasan Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
1.	<p><i>Pelaksanaan Monitoring Realisasi Bongkar Muat</i></p> <p>Dari data Realisasi Bongkar Muat (RBM) yang diambil pada masa audit tanggal 28 Maret 2021, masih ada kegiatan yang belum di realisasikan</p>	Melaksanakan monitoring terhadap kegiatan RBM dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan konfirmasi kepada PBM dan menetapkan aturan batas waktu konfirmasi.	<p>GM Cabang Tanjung Priok</p> <p>31 Desember 2021</p>	2
2.	<p><i>Sewa Lahan untuk Site Office Mitra</i></p> <p>Dari hasil kunjungan lapangan ditemukan Site office milik mitra yang tidak terdaftar dan belum dikenakan sewa. Misalnya, site office milik PT Maritim Polykarya Tama di lapangan 002 Timur.</p>	Melakukan inventarisasi <i>site office</i> milik mitra yang ada di PT PTP Cabang Tanjung Priok untuk dilaporkan kepada Divisi Komersial dan dibuatkan perjanjian.	<p>GM Cabang Tanjung Priok</p> <p>31 Desember 2021</p>	2
3.	<p><i>Adanya Kendala dalam Pengoperasian NPKTOS.</i></p> <p>Berdasarkan wawancara dengan petugas rendal/operasional dalam pengoperasian NPKTOS sejak <i>Go Live/ Trial</i> hingga hari pemeriksaan masih ditemukan kendala-kendala yaitu pada jaringan intrnet dan perlunya evaluasi pada sistem aplikasi NPKTOS (Rencana Penambatan Kapal)</p>	<p>a. Menempatkan petugas IT (ILCS) untuk mendampingi petugas operasional cabang selama masa trial NPKTOS berjalan.</p> <p>b. Memperbaiki/mengganti perangkat IT dengan kualitas yang lebih baik dari eksisting.</p>	<p>GM Cabang Tanjung Priok & VP Sistem Informasi</p> <p>31 Desember 2021</p>	2
4.	<p><i>Alat Bantu Bongkar Muat dalam Kondisi Rusak.</i></p> <p>Pada saat kunjungan lapangan ditemukan alat bantu bongkar muat berupa terpal, jala jala lambung yang kondisinya rusak/sobek tetapi masih digunakan. Hal tersebut bisa berakibat pasir yang dibongkar jatuh ke kolam dan pada jangka waktu tertentu dapat menyebabkan pendangkalan kolam.</p> <p>Selain itu ditemukan juga <i>Hopper</i> yang rusak akibat <i>accident</i> dengan truck pada saat bongkar dan belum diperbaiki sampai dengan saat audit.</p>	<p>a. Segera memperbaiki/mengganti terpal yang rusak/tidak layak pakai, dan melakukan inventarisasi, pengawasan terhadap kondisi dan kelayakannya, serta merencanakan pembelian/penggantian sesuai prosedur.</p> <p>b. Memerintahkan pihak perusahaan <i>trucking</i> untuk segera memperbaiki kerusakan <i>hopper</i> yang diakibatkannya, jika perlu dibuatkan Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memperbaiki.</p>	<p>GM Cabang Tanjung Priok</p> <p>31 Desember 2021</p>	2

Ringkasan Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

11

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
5.	<p>Kepatuhan Penggunaan Alat Perlindungan Diri (APD) di Area Lini I.</p> <p>Sehubungan dengan pemberlakuan surat edaran Direktur Operasi No.HM.608/4/3/1/PTP-21 tentang peraturan mengenakan APD di Aarea Lini I PT Pelabuhan Tanjung Priok sejak 15 Maret 2021, masih banyak ditemukan pekerja yang tidak menggunakan ALPD di Area Lini I.</p>	Berkoordinasi dengan PFSO untuk melakukan patroli di Area Lini I, jika perlu menghentikan kegiatan sampai seluruh persyaratan dipenuhi	<p>GM Cabang Tanjung Priok & VP Pengendalian Kinerja</p> <p>31 Desember 2021</p>	2
6.	<p>Training Untuk Pekerja Yang Baru Menggunakan Sistem</p> <p>Tidak ada <i>training</i> khusus bagi pekerja yang ditugaskan untuk mengoperasikan/menggunakan sistem/aplikasi. Praktik yang dilakukan selama ini, <i>training</i> dilakukan oleh internal cabang.</p>	Berkoordinasi dengan Divisi Sistem Informasi/ILCS untuk melakukan <i>training</i> pengoperasian/penggunaan system/aplikasi pada pekerja yang baru ditempatkan.	<p>GM Cabang Tanjung Priok & VP Sistem Informasi</p> <p>31 Desember 2021</p>	2
7.	<p>Tidak Dilaporkannya user id Pekerja yang Sudah Dimutasi.</p> <p>Tidak ada laporan secara tertulis yang ditujukan ke Divisi Sistem Informasi terkait pencabutan <i>user id</i> bagi pekerja yang sudah di mutasi/tidak lagi bekerja di Cabang Tanjung Priok.</p>	Berkoordinasi dengan Divisi Sistem Informasi untuk melakukan penghapusan <i>user Id</i> pada pekerja yang di mutasi./tidak lagi bekerja di Cabang Tanjung Priok	<p>GM Cabang Tanjung Priok</p> <p>31 Desember 2021</p>	2

1. Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Nota

Observasi

Berdasarkan aplikasi SIM-Barang untuk periode 1 Januari sd 22 Maret 2021 yang disampaikan oleh Bag Rendal Cabang Tanjung Priok diperoleh data berikut :

NO	PRANOTA	PRANOTA	INVOICE	JKM
Uraian	Kegiatan kapal mulai dilakukan	Kapal Selesai	Persetujuan RBM/Terbit Nota	Pemindahan ke SIMKEU
Status Pra/Nota	N, R, I	R, I	I	Kas/Piutang
Jumlah	682	633	585	580
PraNota belum I		48		
Nota belum JKM			5	
JKM Lunas				433
JKM Blm Lunas				147

Telaah lebih lanjut dari data tersebut, menunjukkan kondisi berikut:

- Dari 48 pranota belum terbit invoicennya, diketahui :
 - Tanggal pranota terlama adalah 5 Januari 2021 an pengguna jasa PT IKT,
 - Pranota terbit Januari : 7 buah, Februari : 11 buah dan Maret : 30 buah.
 - Total Realisasi Biaya B/M seluruhnya adalah Rp 8.153.144.670 dengan rincian Biaya Januari: Rp 350.788.698, Feb: Rp 978.050.673 dan Maret Rp 6.824.305.299
 - Biaya Sharing terhutang sebesar Rp 3.689.121.374 dengan rincian Jan: Rp 148.624.897, Feb : Rp 457.086.187 dan Maret: Rp 3.083.410.290.
- Nota/Invoice belum terbit JKM sebanyak 5 buah dengan nilai Rp 1.432.348.676 seluruhnya merupakan bagian PT PTP (dikerjakan sendiri).
- Dari 147 Nota yang belum terbit JKM dengan status belum lunas adalah dikarenakan PBM mitra belum menyampaikan Faktur Pajak PPN sehingga masih tercatat sebagai piutang. Nilai dari 147 JKM yang belum lunas adalah : Rp 19.394.491.673 dengan PPN : Rp 723.681.123 dan PPH 2% sebesar Rp 144.736.225
- Terdapat permasalahan UPER dan Piutang akibat dari pengelolaan nota ini yang akan dijadikan sebagai temuan tersendiri.

Kriteria

- Penerbitan dan pelunasan nota harus dikendalikan dan dimonitor secara terus menerus
- Perjanjian SLA dengan Mitra terkait jangka waktu penyelesaian tagihan hak mitra

1. Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Nota

Root Cause

- a. Kurangnya pengawasan/pengendalian atas penerbitan nota
- b. Ketergantungan dengan mitra (persetujuan, faktur pajak, dsb)
- c. Belum diterapkannya klausul SLA secara tegas dan konsisten

Implikasi terhadap bisnis:

- a. Belum optimalnya pendapatan
- b. Menurunnya citra (image) perusahaan karena ketidaktegasan kepada mitra

Rekomendasi:

- a. Meningkatkan pengawasan terhadap penerbitan nota
- b. Mempercepat penerimaan faktur pajak dari Mitra sebagai dasar penagihan
- c. Menerapkan klausul SLA dengan Mitra secara tegas dan konsisten

**PIC Temuan
Audit/Batas Waktu**

Prioritas

**GM Cabang
Tanjung Priok**
31 Juli 2021

1

Komentar Auditi:

- a. Sudah ditetapkan PIC untuk penerbitan nota dengan status invoice di menu SIM-Barang dan sudah dibuatkan rekap monitoring untuk gagal invoice
- b. Sudah di sosialisasikan oleh PTP Cabang Tanjung Priok terkait klausul SLA.

2. Penetapan dan Approval UPER

Observasi

Berdasarkan Laporan Nota RBM terdapat beberapa nota gagal mengirim invoice (release gagal) periode tahun 2020 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:

NO	MITRA PBM	JML KEG	TAGIHAN SBL PPN	NOMINAL HOLD	NOMINAL PAYMENT	KEKURANGAN DANA
1	MITRA MULTIGUNA GLOBALINDO	24	1.117.444.014	218.705.175	673.048.334	454.343.159
2	DELTA BERKAT JAYA SEJATI	2	161.767.628	98.986.413	177.944.391	78.957.978
3	SARANA BANDAR NASIONAL	1	101.424.355	40.175.269	49.297.769	9.122.500
4	MITRA KARUNIA SAMUDERA	1	207.036.811	106.796.450	108.376.874	1.580.424
JML SELURUHNYA				464.663.307	1.008.667.368	544.004.061

Dari tabel tersebut terlihat :

- Terdapat kekurangan dana sebesar Rp 544.004.061,00 yang tidak dapat ditarik dari rekening autocollection karena nominal yang di hold lebih kecil dari jumlah tagihan.
- Penetapan UPER berdasarkan pengajuan permintaan pelayanan jasa dari Mitra namun komitmen atas pemenuhannya tidak dipantau
- Bagian Rendal Operasi tetap memproses tahapan kegiatan selanjutnya (approval upper) meskipun dana yang dihold tidak mencukupi atau gagal release invoice dan mitra belum/tidak menyetor kekurangan dana.
- Tidak diterapkannya aturan yang menyatakan bahwa pelayanan mitra akan ditangguhkan sebelum menyelesaikan kewajiban atas kegiatan sebelumnya

Kriteria

- Akta Kuasa Operasional PT PTP No. 35 tanggal 25 Februari 2019 yang memberi kuasa penuh GM Cabang atas nama perusahaan untuk menjalankan tugas dan fungsi perusahaan pada Kantor Cabang sesuai kewenangannya.
- SLA dengan Mitra.

2. Penetapan dan Approval UPER

Root Cause

- a. Mitra PBM tidak menyetor dana sesuai dengan UPER yang telah ditetapkan, pada umumnya lebih kecil dari yang ditetapkan
- b. Belum adanya mekanisme yang memungkinkan Bagian Rendal untuk menunda pelayanan akibat kurang bayar/setor UPER

Implikasi terhadap bisnis:

- a. Potensi meningkatnya piutang macet akibat akumulasi tagihan dan pembayaran dilakukan secara lapping (mis. setelah kegiatan keempat baru tagihan untuk kegiatan pertama dibayar) atau kekurangan uper tidak dibayar penuh (hanya sebagian).
- b. Menurunnya citra perusahaan karena kurang tegas/mengutamakan kompromi dalam aturan perusahaan

Rekomendasi:

PIC Temuan Audit/Batas Waktu

Prioritas

- a. Memberikan sanksi tegas misalnya menunda pelayanan atas kekurangan penyetoran UPER serta melarang melakukan kegiatan di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok sebelum seluruh kewajiban dilunasi.
- b. Menambahkan modul dalam SIM-Barang agar sebelum UPER dilunasi muncul *alert* (peringatan) dan tidak mungkin dilakukan tahapan kegiatan selanjutnya (*system locking*)

**GM Cabang
Tanjung Priok**
31 Juli 2021

VP Sistem Informasi
31 Juli 2021

1

Komentar Auditor:

- a. Sudah dilakukan koordinasi dengan pihak rendal terkait penundaan pelayanan dan kekurangan UPER dengan mengirimkan rekap gagal invoice
- b. Akan dilakukan koordinasi dengan sistem informasi, apakah dapat dijalankan sistem tersebut

3. Pengelolaan Piutang dan Kewajiban Penyampaian Faktur Pajak

Observasi

SLA dalam Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Usaha Terminal di PT Pelabuhan Tanjung Priok antara PT PTP dengan seluruh Mitra, dinyatakan bahwa Mitra diwajibkan menyampaikan Faktur Pajak Standar/e-faktur dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah nota terbit dan PT PTP berhak menolak dan atau menunda permintaan pelayanan berikutnya serta mengenakan denda pajak.

Berdasarkan audit kami ditemukan bahwa pemberlakuan klausul pada SLA ini belum dilaksanakan sepenuhnya, sehingga masih dijumpai lambatnya penyerahan faktur pajak dari mitra. Dampak dari kelambatan penyerahan faktur pajak ini :

- Saldo piutang dicatat terlalu besar (overstated), karena dicatat sebesar 100% padahal piutang PT PTP hanya sebesar sharing (40 – 60%)
- Sebaliknya PPN Keluaran dibayar terlalu besar karena dibayar 100% padahal beban PT PTP hanya sebesar sharing (40-60%)

Sebagai gambaran berikut disajikan sampel table piutang riil dan faktur pajak yang belum diterima:

SAMPLE CUSTOMER AUTOCOLLECTION

NO	PERUSAHAAN	PIUTANG 100%	SISA PIUTANG	FAKTUR PAJAK 10%
1	DAISY MUTIARA SAMUDRA	915.873.046	498.149.354	45.286.304
2	JASA ANUGERAH SAMUDERA	67.385.500	107.618.194	9.783.472
3	KALUKU MARITIMA UTAMA	4.033.566.160	2.181.648.904	198.331.718
4	MITRA MULTIGUNA GLOBALINDO	6.168.038.004	2.977.710.655	270.700.968
5	SARANA BANDAR Indonesia	72.742.989	39.229.252	3.566.295
6	SRIKREASI UNGGUL PERSADA	148.730.255	81.287.817	7.389.802
7	TANGGUH SAMUDERA JAYA	666.545.000	173.195.000	15.745.000
8	TUBAGUS JAYA MARITIM	5.818.212.343	3.102.582.107	282.052.919
	JUMLAH	18.191.093.297	9.161.421.283	832.856.480

Dari data tersebut terlihat bahwa karena faktur pajak belum diterima, maka Piutang tercatat sebagai 100% atau sejumlah Rp 18.191.093.297,00 sedangkan Sisa Piutang Riil hanya sebesar Rp 9.161.421.283,00 (atau sebesar 50%). Nilai faktur pajak adalah 10% dari sisa piutang riil atau 9,09% dari sisa piutang yakni sebesar Rp 832.856.480.

3. Pengelolaan Piutang dan Kewajiban Penyampaian Faktur Pajak

Ilustrasi pembukuan Piutang terkait dengan faktur pajak adalah sebagai berikut:

URAIAN	PIUTANG	KSMU	PAJAK
Penerbitan Nota	Piutang Usaha (100%) Pendapatan (100%)	Beban KSMU (60%) Hutang KSMU (60%)	PPN Keluaran (100%) Bank (100%)
Pelunasan Piutang	Bank (40%) Piutang Usaha (40%)	-	-
Jurnal Penyesuaian	A/R Netting (60%) Piutang Usaha (60%)	Hutang KSMU (60%) A/R Netting (60%)	PPN Masukan (60%) PPN Keluaran (60%)

Dari ilustrasi tersebut dapat dijelaskan bahwa pada saat pelunasan (*net off*), maka Piutang baru bisa di *net-off* jika faktur pajak dari mitra diterima (PPN Masukan). Jika langsung dianggap lunas 100%, maka PT PTP menanggung beban PPN 60% yakni sebesar *sharing* dari mitra tersebut.

Kriteria

SLA dalam Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Usaha Terminal di PT Pelabuhan Tanjung Priok antara PT PTP dengan seluruh Mitra, pada pasal 6 Pola dan Sistem Kerjasama khususnya ayat 9 yang menyatakan terkait penagihan atas realisasi kegiatan bongkar muat yang menjadi bagian/hak pihak kedua (mitra) maka piha kedua berkewajiban menyerahkan bukti penagihan yang terdiri dari surat penagihan, copy pranota, invoice dan faktur pajak standar/e-faktur. Apabila pihak kedua belum menyerahkan bukti penagihan sebagaimana tersebut di atas kepada pihak pertama dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah nota terbit, maka pihak pertama berhak menolak dan/atau menunda permintaan pelayanan jasa bongkar muat berikutnya serta mengenakan denda perpajakan terhadap pihak kedua sampai dengan diserahkannya bukti penagihan tersebut

Root Cause

- Penerapan klausul SLA kurang tegas dan konsisten
- Masih adanya intervensi terhadap pemberlakuan klausul tersebut oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan
- Belum adanya komitmen seluruh stakeholder perusahaan terhadap penerapan sanksi kepada Pengguna Jasa yang melakukan pelanggaran

Implikasi terhadap Bisnis

- Potensi terjadinya dispute antara PT PTP dengan mitra terkait saldo piutang/kewajiban mitra/pengguna jasa
- Saldo Piutang tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya
- Risiko PT PTP menanggung PPN yang seharusnya menjadi beban Mitra

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

18

3. Pengelolaan Piutang dan Kewajiban Penyampaian Faktur Pajak

Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
<ul style="list-style-type: none">a. Mendesak Mitra untuk mempercepat penyerahan faktur pajak dan mengenakan denda pajak dan/atau menunda pelayanan jika faktur pajak tidak diterimab. Meminta komitmen seluruh <i>stakeholder</i> perusahaan terutama para pengambil keputusan untuk melaksanakan klausul SLA secara tegas dan konsistenc. Menolak segala intervensi dari pihak manapun terkait penerapan klausul SLA	GM Cabang Tanjung Priok 31 Desember 2021	2
Komentar Auditi: <ul style="list-style-type: none">a. Sudah di masukan ke dalam klausul SLA dan akan di berlakukan juga secara sistem oleh komersil, jika tidak menyerahkan faktur pajak, sistem penyandaran berikut akan ditolakb. Sudah di sosialisasikan oleh team komersil dan PT. PTP Cabang Tanjung Priokc. Sedang disiapkan sistem untuk sharing informasi kelengkapan oleh team operasional dengan team sistem infomasi PT. PTP Pusat		

4. Nota-nota Manual

Observasi

Dari audit kami terhadap penerbitan nota ditemukan masih adanya nota-nota manual yakni nota atas pembayaran kewajiban lumpsum berdasarkan Berita Acara Perjanjian Lumpsum Tahun 2020/2021 dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA MITRA	ISI PERJANJIAN	MASA BERLAKU	TOTAL TAGIHAN	PERIODE
1	PT. AKR CORPORINDO TBK	PENIMBUNAN ALAT-ALAT BANTU BONGKAR MUAT	1/7/2020 - 30/06/2021	11.167.200	BULAN
2	PT. ANDHIKA ANDALANTAMA	PEMBAHARUAN ALAT-ALAT BONGKAR MUAT	Jan - Maret 2021	8.316.000	BULAN
3	CV. HIDUP SUKSES MANDIRI	KERJASAMA OPERASI DAN PELAYANAN BONGKAR MUAT DAN PENIMBUNAN CURAH KERING	1/1/2021 - 31/12/2021	85.000.000	BULAN
4	PT. HEMPRISA KARYA SAKSAMA	KESEPAKATAN PENGGUNAAN FASILITAS CONTAINER OFFICE	1/7/2020 - 30/6/2021	6.387.500	TAHUN
5	PT. LAUTAN LUAS	PENIMBUNAN ALAT-ALAT BANTU BONGKAR MUAT	1/7/2020 - 30/6/2021	9.147.600	BULAN
6	PT. PELAYARAN NUSANTARA SEJATI	PENIMBUNAN ALAT-ALAT BANTU BONGKAR MUAT	1/7/2020 - 30/6/2021	6.387.500	TAHUN
7	PT. KARYA TEKNIK PASIRINDO	KERJASAMA OPERASI DAN PELAYANAN BONGKAR MUAT DAN PENIMBUNAN CURAH KERING	1/1/2021 - 31/3/2021	70.300.000	BULAN
8	PT ROSWELL PASIFIC INDONESIA	KERJASAMA PENGOPERASIAN GUDANG	15/2/2021 - 14/8/2021	3.431.337.000	6 BULAN
9	PENGUSAHA KANTIN	KESEPAKATAN PENGGUNAAN FASILITAS KANTIN	1/8/2020 - 30/7/2021	6.387.500	TAHUN
10	PT. SALAM PACIFIC INDONESIA LINES (SPIL)	KERJASAMA PELAYANAN OPERASI	1/12/2020 - 30/11/2021	3.780.000.000	3 TAHAP
11	PT. TANTO INTIM LINE	KERJASAMA PELAYANAN OPERASI	30/7/2020 - /4/2023	43.800.000.000	9 TAHAP
12	PT. CINTA HARAPAN JAYA	KESEPAKATAN PENGGUNAAN FASILITAS DAN PENEMPATAN CONTAINER OFFICE	1/3/2021 - 28/2/2022	12.775.000	TAHUN

4. Nota-nota Manual

Nota-nota lumpsum tersebut diterbitkan berdasarkan nota dinas dari Cabang Tanjung Priok kepada Divisi Treasury Kantor Pusat. Selanjutnya Divisi Treasury membuat atau meneruskan permintaan pembuatan nota tersebut ke CSC.

Dari penjelasan yang disampaikan dapat diambil kesimpulan bahwa :

- a. Cabang Tanjung Priok menggunakan prosedur yang berbeda dengan Cabang lain di PTP yang secara mandiri bisa menerbitkan nota-nota manual
- b. Cabang Tanjung Priok mengajukan penerbitan nota manual ke Divisi Treasury dengan alasan bahwa tidak diberi akses ke SIMKEU dan praktik selama ini penerbitan nota dilakukan di Kantor Pusat cq Divisi Treasury
- c. Karena nota diajukan ke CSC oleh Divisi Treasury maka sebagai fungsi responsibilitas nota tersebut menjadi tanggung jawab Divisi Treasury a.l penanda tangan invoice
- d. Karena nota-nota manual tersebut terkait kegiatan operasional di lapangan, terdapat risiko Divisi Treasury tidak mengetahui secara pasti kebenaran materiil dari nota tersebut. Divisi Treasury lebih melihat pada kebenaran formil nota tersebut.
- e. Dengan beralihnya responsibilitas dari Cabang Tanjung Priok ke Divisi Treasury dikhawatirkan Cabang Tanjung Priok menjadi lepas tangan terhadap tindak lanjut penagihan/pelunasan dari nota tersebut dan menganggap sebagai tanggung jawab Divisi Treasury.
- f. Di sisi lain, penerbitan nota ini menjadi tambahan tugas bagi Divisi Treasury yang memiliki sumber daya terbatas.

Kriteria

- a. Cabang perusahaan seharusnya mandiri dalam penerbitan dan pengelolaan nota pelayanan jasa sampai tertagihnya atau terhadap penyelesaian piutang yang ditimbulkannya
- b. Cabang Pelabuhan Tanjung Priok mempunyai sumber daya yang lebih besar dibanding Divisi Treasury sehingga lebih mungkin dapat melakukan sendiri

Root Cause

- a. Belum diberikannya akses penerbitan nota di aplikasi SIMKEU kepada Cabang Tanjung Priok
- b. Prosedur penerbitan nota di kantor pusat adalah prosedur lama yang belum diperbarui seiring meningkatnya status Cabang sebagai Cabang Mandiri

Implikasi terhadap Bisnis

- a. Tambahan tugas bagi Divisi Treasury
- b. Cabang Tanjung Priok kurang mandiri

4. Nota-nota Manual

Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
a. Memberikan akses penerbitan nota manual di aplikasi SIMKEU kepada Cabang Tanjung Priok	VP Sistem Informasi 31 Desember 2021	2
b. Memperbarui prosedur penerbitan nota yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan status Cabang	GM Cabang Tanjung Priok 31 Desember 2021	2
Komentar Auditi: a. Akan dikoordinasikan dengan keuangan dan sistem informasi terkait akses SIMKEU untuk <i>create</i> data manual. Apakah dapat diberikan dan dilakukan training b. Akan dikoordinasikan dengan keuangan dan pengendalian terkait SOP yang ada.		

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

5. Data Penggunaan Gantry Luffing Crane Kurang Akurat

Observasi

a. Data penggunaan dan pendapatan Gantry Luffing Crane/GLC kurang akurat

NO. GLC	NAMA KAPAL	total Pra Nota	%	PBM	KADE	TANGGAL KEGIATAN	KOMODITI BARANG	JUMLAH TON/BOX			JUMLAH PENDAPATAN
								GENERAL CARGO	BAG CARGO	CURAH KERING	
4	MV. BBC UTAH	947	14%	ATHOTAMA	115	2-Jan-21	GENCAR	129			6.500.000
1	MV. MANDARIN RIVER	9168	21%	DAISY MUTIARA SAMUDRA	101 U	1-Jan-21	GENCAR	3988			45.862.000
2	MV. MANDARIN RIVER	12866		DAISY MUTIARA SAMUDRA	101 U	1-Jan-21	GENCAR	587			6.750.500
4	MV. HOSEI HIMALAYA	2041	14%	PRIMA BANDAR SAMUDERA	115	4-Jan-21	GENCAR	280			6.500.000
2	MV. GREEN FUTURE	4825	23%	DAISY MUTIARA SAMUDRA	101U	7-Jan-21	GENCAR	1103			12.684.500
11	MV. RUBATO	5113	22%	TUBAGUS JAYA MARITIM	115	10-Jan-21	GENCAR	1126			12.949.000
6	KM VISION GLOBAL	580	14%	JAYA CARGO GEMILANG INDONESIA	102	12-Jan-21	GENCAR	80			6.500.000
11	MV. JUMEIRAH BEACH	9377	13%	ROSSWELL PASIFIC INDONESIA	115	12-Jan-21	GENCAR	1249			14.363.500
11	MV. COSMIC POLARIS	3642	6%	LAPANITIGA LINTAS BUANA	115	14-Jan-21	GENCAR	204			6.500.000
7	MV. LV SONG HAI	21900	3%	TRANS TRIJAYA SAMUDERA	114	7-Jan-21	BAG CARGO	720			8.280.000
11	MV. JADE CASTLE	6110	20%	ROSSWELL PASIFIC INDONESIA	115	17-Jan-21	GENCAR	1206			13.869.000
9	MV. MYKALI	18020	17%	ROSSWELL PASIFIC INDONESIA	114	19-Jan-21	GANDUM	3000			34.500.000
3	MV. MYKALI			ROSSWELL PASIFIC INDONESIA	114	19-Jan-21	GANDUM	1501			17.261.500
2	MV. HIBARINO	1479	19%	DAISY MUTIARA SAMUDRA	101U	19-Jan-21	GENCAR	287			6.500.000
7		16046	0%	SBN	114	19-Jan-21	BAG CARGO	0			
7	BG. SAMUDRA RAYA 2	6397	0%	SRIKREASI UNGGUL PERSADA	114	27-Jan-21	GENCAR	1			6.500.000
11	MV. KEIO CORAL			KARYA ABDI LUHUR	115	31-Jan-21	GENCAR	1879			21.608.500
10	MV. KEIO CORAL	10670	18%	KARYA ABDI LUHUR	115	31-Jan-21	GENCAR	681			7.831.500
5	SAWU SEA V.227 AJ			FIRMA BERKAH JAYA	102	29-Jan-21	PETIKEMAS	784			28.713.500
6	SAWU SEA V.227 AJ	534	147%	FIRMA BERKAH JAYA	102	29-Jan-21	PETIKEMAS	1112			4.800.000
5	SAWU SEA V.227 AJ			FIRMA BERKAH JAYA	102	29-Jan-21	PETIKEMAS	2002			19.360.000
6	SAWU SEA V.227 AJ			FIRMA BERKAH JAYA	102	29-Jan-21	PETIKEMAS	3387			19.427.500
3	ROYAL 09	1896	230%	CITRA DERMAGA PERKASA	101	2-Feb-21	STEEL COIL	4358			15.288.000
4	ROYAL 09			CITRA DERMAGA PERKASA	101	2-Feb-21	STEEL COIL	68			21.681.000
3	ACHILLEAS S	29532	9%	TUBAGUS JAYA MARITIM	114	30-Jan-21	STEEL BILLET	1640		2629	38.950.500
1	AUDREY SW	17429	0%	TRIUTAMA KURNIA SEJAHTERA	101	2-Feb-21	STEEL COIL	1640			50.117.000
7	FEDERAL OSAKA	9932	6%	BERJAYA INDAH GEMILANG	114	3-Feb-21	SODA ASH IN BULK	558			30.233.500
1	GLORY EXPLORER	3822	2%	TRIUTAMA KURNIA SEJAHTERA	101	5-Feb-21	STEEL COIL	60			10.994.000
11	AMBER BAVERLY	7350	16%	DAISY MUTIARA SAMUDRA	115	5-Feb-21	GENERAL CARGO	1196			20.631.000
7	BAR	10068	4%	KARYA ABDI LUHUR	114	6-Feb-21	GENERAL CARGO	358			28.945.500
2	PULAU AOIS	1801	141%	DAISY MUTIARA SAMUDRA	101	7-Feb-21	STEEL COIL	2539			6.500.000
2	TK. SAMUDRA EMAS 2	9501	1%	SRIKREASI UNGGUL PERSADA	101	30-Jan-21	EXCAVATOR	68			6.500.000
4	LAKAS	4785	23%	SINAR BERLIAN INDRAPURA	115	9-Feb-21	GENERAL CARGO	1103			13.754.000
2	HR REVOLUTION	540	222%	TRANS TRIJAYA SAMUDERA	101	9-Feb-21	GENERAL CARGO	1199			6.500.000
3	AFRICAN SANDERLING	10155	6%	TUBAGUS JAYA MARITIM	114	8-Feb-21	GENERAL CARGO	646			29.198.500
6	OCEAN KAYA	3693	9%	TUBAGUS JAYA MARITIM	102	10-Feb-21	SCRAP	20		325	12.597.000
6	OCEAN KAYA			TUBAGUS JAYA MARITIM	102	10-Feb-21	EXCAVATOR	909			1.950.000
3	SEA TIMBER	11002	2%	TAO ABADI JAYA	101	11-Feb-21	MANGANESE ORE	244			31.625.000
3	HOANG TUAN 69			TRI MULIA BARUNA PERKASA	101	12-Feb-21	SULPHUR IN BULK			3536	6.727.500
7	ATLANTIC FAIRY	975	129%	TRI MULIA BARUNA PERKASA	114	9-Feb-21	GENERAL CARGO			1258	6.500.000
	ATLANTIC FAIRY	4795	25%	ROSSWELL PASIFIC INDONESIA	114	10-Feb-21	GENERAL CARGO			1199	
1	AQUA BLUE	3494	2%	DAISY MUTIARA SAMUDRA	101	16-Feb-21	GENERAL CARGO	80			10.051.000
1	PEGGY WAY	3207	140%	DAISY MUTIARA SAMUDRA	101	17-Feb-21	GENERAL CARGO			4500	8.510.000
2	MIGHTY BOSS	1803	328%	TRIUTAMA KURNIA SEJAHTERA	101	17-Feb-21	GENERAL CARGO			5918	6.500.000
6	TK. LION KIMTRANS 2302	3186	238%	TUBAGUS JAYA MARITIM	102	16-Feb-21	SCRAP			7583	11.992.500
6	TK. LION KIMTRANS 2302			TUBAGUS JAYA MARITIM	102	16-Feb-21	EXCAVATOR	49			1.560.000
9	ANDROMEDA	18001	10%	ROSSWELL PASIFIC INDONESIA	114	15-Feb-21	GANDUM IN BULK	1800			51.750.000
11	XIN HAI XIANG	790	522%	ROSSWELL PASIFIC INDONESIA	115	17-Feb-21	GENERAL CARGO			4125	6.500.000
4	JADE CASTLE			ROSSWELL PASIFIC INDONESIA	115	18-Feb-21	GENERAL CARGO			4367	20.700.000
11	XIN HAI XIANG	2376	174%	KALKUK MARITIMA UTAMA	115	18-Feb-21	GENERAL CARGO			4125	6.831.000
3	LOWLANDS BRABO	27501	14%	TAO ABADI JAYA	114	17-Feb-21	GYPSPUM IN BULK			3884	79.062.500
7	STAR ERACLE	16501	12%	ESCORINDO MITRA SETIA	114	21-Feb-21	GYPSPUM IN BULK	1951			47.437.500
3	MIKAWA	7803	1%	PRIMA BANDAR SAMUDERA	101	21-Feb-21	GENERAL CARGO	61			22.436.500
3	MIKAWA			PRIMA BANDAR SAMUDERA	101	21-Feb-21	FORKLIFT	126			115.000
4	OCEAN GLORY	2252	5%	KARYA ABDI LUHUR	115	21-Feb-21	GENERAL CARGO	110			6.500.000
1	EVER CHAMPION	2885	20%	DAISY MUTIARA SAMUDRA	101	23-Feb-21	GENERAL CARGO	509			7.475.000
7	T SYMPHONY	0	#DIV/0!	TUBAGUS JAYA MARITIM	114	23-Feb-21	GENERAL CARGO	681			49.300.500
7	CL BILIU HE	17000	16%	BERJAYA INDAH GEMILANG	114	27-Feb-21	SODA ASH IN BULK	2789			48.875.000
7	VOYAGER	8540	25%	TUBAGUS JAYA MARITIM	114	10-Feb-21	GENERAL CARGO	2122			24.552.500
11	XIN HAI XIANG	5804	26%	TUBAGUS JAYA MARITIM	115	13-Feb-21	GENERAL CARGO	1508			6.785.000

Dari data di atas, didapati adanya penggunaan GLC yang melebihi 100% dari jumlah bongkar/muatnya dan didapati pula kegiatan yang tidak menggunakan GLC.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

5. Data Penggunaan Gantry Luffing Crane Kurang Akurat

b. Penetapan penggunaan GLC

Meskipun sudah ada ketentuan penggunaan GLC sebesar minimal 25% dari total tonnage bongkar muat, masih ada kegiatan B/M tanpa penggunaan GLC. Kegiatan bongkar muat yang tidak menggunakan GLC adalah sebagai berikut :

1. MV CL Biliu HE di kade 114 bongkar 17.000 ton *Soda Ash* tanggal 17-20 Februari 2021 PBM PT TJM
2. BBC Zarate di Kade 114 bongkar 2.068 ton *General Cargo* tanggal 4-5 Februari 2021 PBM PT TJM
3. MV. T Symphony di kade 114 bongkar 17.144 ton *Steel Coils* tanggal 13-15 Februari 2021 PBM PT TJM

c. Penggunaan GLC melebihi jumlah total B/M

Dari data penggunaan dan pendapatan GLC bulan Januari dan Februari 2021 yang dibandingkan dengan jumlah muatan yang tertera di Realisasi B/M serta Pra Nota bongkar muat terdapat beberapa ketidak akuratan data seperti terjadi pada kegiatan kapal-kapal berikut ini

No.	Nama Kapal	Tanggal Kegiatan	Tonase RBM	Penggunaan GLC	Selisih
1.	MV. Antrung 168	2-3/1/21	2.988	2.989	1
2.	MV. Hoang Trieu 69	9-10/1/21	3.835	3.855	20
3.	MV. H. Seal	29/1/21	3.626	3.630	4
4.	MV. Sawu Sea	29/1/21	534	7.285	6.751
5.	MV. Royal 09	2/2/21	1.896	5.998	4.102
6.	MV. HR Revolution	9-10/2/21	540	1.199	659
7.	MV. Pulau AOI	7/2/21	1.801	2.539	738
8.	MV. Peggy Way	17/2/21	3.207	4.500	1.293
9.	MV. Mighty Boss	17/2/21	1.803	5.918	4.115
					17.683

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

5. Data Penggunaan Gantry Luffing Crane Kurang Akurat

Kriteria

- Pembuatan data penggunaan GLC harus teliti dikarenakan laporan tersebut dilaporkan ke pihak internal (divisi operasi dan keuangan) maupun kepada pihak eksternal (IPC) dan instansi terkait lainnya.
- Sebagai dasar perhitungan produksi alat, jumlah *tonnage* tiap GLC akan mempengaruhi *availability*, umur alat serta perawatan alat.

Root Cause

- Belum adanya aturan tentang tarif penggunaan alat dermaga *Gantry Luffing Crane* (GLC) yang disesuaikan dengan kondisi yang diberlakukan saat ini seperti pemberlakuan *upper*, *Minimum Charge* dan kondisi yang terkait pengecualian dan lain sebagainya
- Petugas pelaporan kurang teliti dalam membuat laporan.
- Lemahnya pengawasan terhadap pencatatan Produksi dan Pendapatan GLC

Implikasi terhadap bisnis:

- Potensi terjadinya ketidak seragaman (*equal treatment*) penerapan tarif dan kewajiban penggunaan GLC kepada PBM
- Tidak akuratnya pencatatan produksi dan pendapatan serta data yang dilaporkan kepada pihak internal maupun eksternal.

Rekomendasi:

- Melakukan revidi berjenjang terhadap kegiatan pencatatan data produksi dan pendapatan GLC.
- Melakukan *coaching* kepada petugas administrasi untuk kegiatan pencatatan, pengumpulan dan pelaporan.
- Mengusulkan kepada Direktorat Komersial untuk meratifikasi dan/atau menetapkan aturan tentang penggunaan GLC di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok

PIC Temuan Audit/Batas Waktu

**GM Cabang
Tanjung Priok**
31 Desember 2021

Prioritas

2

Komentar Auditor:

- Akan dilakukan penyesuaian dan format yang sudah disesuaikan, terkait adanya salah input jumlah box ke dalam gencar
- Akan dilakukan mengecek ulang hasil input
- Sudah dibuatkan berita acara terkait penggunaan GLC dan pembayaran uper sebelum menggunakan GLC

6. Pekerjaan Peningkatan Jalan Akses Inggom

Observasi

- Pekerjaan Peningkatan Jalan Industri 1 yang merupakan jalan akses dari dan menuju areal Inggom dilaksanakan oleh IPC Cabang Tanjung Priok. *Kick off* dilaksanakan pada 6 Nopember 2021, namun demikian pelaksanaanya pekerjaan tersebut dilaksanakan pada 19 Februari 2021. Sehingga terjadi keterlambatan pelaksanaan hingga 3 (tiga) bulan.
- Semula pekerjaan diperkirakan selesai pada Juli 2021 namun dengan keterlambatan dimulainya pekerjaan, maka diperkirakan pekerjaan tersebut akan berakhir pada bulan September 2021.
- Dampak dari pekerjaan tersebut antara lain :
 - Dengan adanya pengerjaan peninggian/peningkatan jalan Industri 1 tersebut mengakibatkan tidak dapat dilaluinya akses menuju dan ke dermaga Inggom khususnya muatan besar *heavy duty equipment* dan muatan yang diangkut menggunakan *low bed truck*
 - menyebabkan perusahaan-perusahaan yang sebelumnya mengerjakan kegiatan bongkar muat di Dermaga Inggom yang didominasi kegiatan bongkar muat alat-alat berat dan project cargo mengalihkan kegiatannya ke dermaga lain.
 - Penurunan pendapatan sejak dimulainya pekerjaan tersebut mencapai 50% dengan data sebagai berikut :

Bulan	Produksi			Pendapatan		
	Ton/m3	Unit	Box	B/M	Storage	Total
Januari 2021	6.463	146	12	1.110.719.727	33.415.875	1.144.135.602
Februari 2021	5.541	246	81	1.510.495.929	114.716.250	1.625.212.179
Maret 2021*	2.951	53	2	745.688.441	13.523.625	759.212.066

Penurunan pendapatan di bulan Maret diperkirakan akan terjadi hingga akhir masa pekerjaan peningkatan jalan tersebut (September 2021) dikarenakan akses dan perbaikan lapangan di Inggom masih akan mempengaruhi kegiatan di dermaga Inggom.

6. Pekerjaan Peningkatan Jalan Akses Inggom

Kriteria

- Pengerjaan lapangan seharusnya tidak mengganggu kegiatan bongkar muat
- Pembayaran Nilai Kerjasama dan Nilai Kontribusi Bagi Hasil (*sharing*)

Root Cause

Kurangnya koordinasi dengan IPC Cabang Tanjung Priok dalam pembahasan perencanaan serta dampak terhadap perjanjian tentang Kerjasama Optimalisasi Pengelolaan Aset PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok Di Dermaga Dan Lapangan Inggom terkait Nilai Kerjasama dan Nilai Kontribusi Bagi Hasil (*sharing*)

Implikasi terhadap bisnis:

- Berkurangnya pendapatan akibat berkurangnya kegiatan di dermaga dan Lapangan Inggom
- Potensi kerugian akibat pembayaran Nilai Kerjasama dan Nilai Kontribusi Bagi Hasil (*sharing*) lebih besar dari pendapatan yang diterima.

Rekomendasi:

- Membuat kajian dampak pekerjaan peningkatan jalan Industri terhadap produksi dan pendapatan.
- Mengajukan/menyampaikan surat permohonan penyesuaian Nilai Kerjasama dan Nilai Kontribusi Bagi Hasil (*sharing*) kepada IPC cabang Tanjung Priok.

PIC Temuan Audit/Batas Waktu

**GM Cabang
Tanjung Priok**
31 Desember 2021

Prioritas

2

Komentar Auditor:

Akan dibuatkan kajian dampak terhadap produksi dan pendapatan

7. Penerapan Imbalan Jasa Alat

Observasi

Dari hasil wawancara dan kunjungan lapangan didapat Tongkang yang bekerja dengan menggunakan kran darat sebagai berikut :

DAFTAR KEGIATAN BONGKAR/MUAT KAPAL DI KADE 001-004 PT. PTP CABANG TANJUNG PRIOK

NO	NAMA KAPAL	TANGGAL KEGIATAN		DERMAGA	JENIS BARANG	JUMLAH CARGO	NAMA ALAT	NAMA PERUSAHAAN	
		TANGGAL SANDAR	TANGGAL LEPAS TALI					PBM	PEMILIK ALAT
1	BG. TITAN 44	09 March 2021	12 March 2021	002	GENCAR/TIANG PANCANG	5.040	SHORE CRANE	PT. MARITIM POLYKARYA TAMA	PT. LEMO
2	BG. NAOMI	13 March 2021	17 March 2021	003	BREAK BULK	5.518	SHORE CRANE	PT. MARITIM POLYKARYA TAMA	PT. LEMO
3	SUMBER MAS - XII TK	17 March 2021	19 March 2021	004	BREAK BULK	2.000	SHORE CRANE	PT. MARITIM POLYKARYA TAMA	PT. LEMO

Dari data tersebut diperoleh penjelasan sebagai berikut:

- Kran darat milik mitra tersebut parkir di wilayah lini I/II.
- Belum dikenakan biaya imbalan jasa alat dan biaya penumpukan atas alat bantu bongkar muat tersebut.

Kriteria

Keputusan Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II No : HK 56/3/1/p1.II.03 Tentang Tarif Pelayanan Jasa Alat Di Lingkungan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II.

Root Cause

- Masih terdapat alat-alat milik mitra (*shore crane*) yang bekerja di lini I/II tidak dikenakan pembayaran imbalan jasa alat.
- Belum ada aturan juklak/juknis sebagai pedoman pengenaan tarif imbalan jasa alat.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

7. Penerapan Imbalan Jasa Alat

Implikasi terhadap bisnis:

- Berpotensi kehilangan pendapatan perusahaan (*profit loss*).
- Berpotensi menyebabkan kerusakan fasilitas perusahaan (dermaga dan lapangan).
- Menguntungkan perusahaan lain (mitra).

Rekomendasi:

PIC Temuan Audit/Batas Waktu

Prioritas

- Menginventarisasi peralatan milik perusahaan penyedia alat/vendor di luar skema perjanjian untuk dibuatkan perjanjian ataupun Berita Acara imbalan jasa alat.
- Membuat aturan/dasar penagihan besaran tarif imbalan jasa alat bagi mitra/vendor di luar skema perjanjian.

**GM Cabang
Tanjung Priok**
31 Desember 2021

2

VP. Komersial
31 Desember 2021

2

Komentar Auditi:

- Sudah ada aturan terkait imbalan jasa alat HMC (Berita Acara Kesepakatan No. UM.339/23/6/11/PTP-16 tentang Besaran sharing Penggunaan HMC & CC di PTP) dan Sudah ada perjanjian dengan Kaluku terkait jasa alat HMC (Perjanjian No. PR.102/8/2/1/OPS.TGP.PTP-21 tentang perjanjian kerjasama kegiatan pelayanan B/M Multipurpose di PTP dan akan dibuatkan untuk jasa alat temas Terkait tarif jasa alat HMC
- Sudah dilakukan penagihan jasa alat melalui RBM
- Akan dibuatkan perjanjian dengan vendor alat untuk dasar penagihan imbal jasa alat dan sudah masuk ke dalam RKM Strategis 2021 untuk program single billing alat

8. *Evaluasi Kegiatan Operasional Bongkar Muat Belum Dilaksanakan.*

Observasi

Dari keterangan petugas, Cabang Tanjung Priok belum melaksanakan evaluasi kegiatan operasional bongkar muat sejak penetapan tambat hingga kapal selesai kegiatan bongkar muat (alokasi waktu, gang buruh, TGH, jumlah alat, dll).

Evaluasi kegiatan bongkar muat belum dilaksanakan baik untuk kapal yang dikerjakan sendiri oleh PT PTP Cabang Tanjung Priok maupun kegiatan bongkar muat yang dilaksanakan oleh PBM Mitra.

Sesuai prosedur Perencanaan dan Persiapan Pengendalian Operasi kegiatan evaluasi dilaksanakan oleh DGM Bongkar Muat melalui WI.01/COP/COP/01/01

Kriteria

- a. Pelaksanaan Prosedur Perencanaan dan Persiapan Pengendalian Operasi QP.1/COP/COP/01 tanggal 17 Juli 2019.
- b. Evaluasi kegiatan operasional bongkar muat, dapat melakukan efisiensi dan peningkatan efektifitas untuk tiap-tiap kapal selanjutnya.

Root Cause

- a. Tidak dijalankannya SOP yang berlaku yaitu petugas Rendal belum melaksanakan evaluasi kinerja bongkar muat setelah kapal selesai kegiatan.
- b. Lemahnya pengawasan dari atasan langsung.

Implikasi terhadap bisnis:

- a. Dapat dicabutnya sertifikasi standar mutu ISO karena tidak dilaksanakannya SOP yang berlaku.
- b. Tidak ada tolak ukur keberhasilan kinerja bongkar muat.
- c. Dapat mengurangi kreativitas dan keinginan untuk meningkatkan kinerja produksi dan pendapatan

8. Evaluasi kegiatan operasional bongkar muat belum dilaksanakan

Observasi

Dari keterangan petugas, Cabang Tanjung Priok belum melaksanakan evaluasi kegiatan operasional bongkar muat sejak penetapan tambat hingga kapal selesai kegiatan bongkar muat (alokasi waktu, gang buruh, TGH, jumlah alat, dll).

Evaluasi kegiatan bongkar muat belum dilaksanakan baik untuk kapal yang dikerjakan sendiri oleh PT PTP Cabang Tanjung Priok maupun kegiatan bongkar muat yang dilaksanakan oleh PBM Mitra.

Sesuai prosedur Perencanaan dan Persiapan Pengendalian Operasi kegiatan evaluasi dilaksanakan oleh DGM Bongkar Muat melalui WI.1/COP/COP/01/01

Kriteria

- Pelaksanaan Prosedur Perencanaan dan Persiapan Pengendalian Operasi QP.1/COP/COP/01 tanggal 17 Juli 2019.
- Evaluasi kegiatan operasional bongkar muat, dapat melakukan efisiensi dan peningkatan efektifitas untuk tiap-tiap kapal selanjutnya.

Root Cause

- Tidak dijalankannya SOP yang berlaku yaitu petugas Rendal belum melaksanakan evaluasi kinerja bongkar muat setelah kapal selesai kegiatan.
- Lemahnya pengawasan dari atasan langsung.

Implikasi terhadap bisnis:

- Dapat dicabutnya sertifikasi standar mutu ISO karena tidak dilaksanakannya SOP yang berlaku.
- Tidak ada tolak ukur keberhasilan kinerja bongkar muat.
- Dapat mengurangi kreativitas dan keinginan untuk meningkatkan kinerja produksi dan pendapatan

Rekomendasi:	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
<ol style="list-style-type: none"> Membuat evaluasi kinerja bongkar muat sesuai SOP untuk setiap kegiatan bongkar muat yang divalidasi secara berjenjang. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan SOP yang berlaku. 	<p>GM Cabang Tanjung Priok 31 Desember 2021</p>	<p>2</p>

Komentar Auditi:

- Evaluasi kinerja dibuat setiap bulan oleh pengendalian kinerja dan otoritas pelabuhan
- Sudah dilakukan Audit Mutu internal setiap tahunnya
- Masih kurang personil di Rendal, sehingga perencanaan dan pengendalian masih menjadi 1 bagian

9. Aplikasi SIM-Barang Perlu di Sempurnakan

Observasi

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada bagian pembuatan pranota di Cabang Tanjung Priok , didapati kondisi berikut:

Pada sistem SIM-Barang terdapat pilihan satuan/kemasan yang belum di default berdasarkan jenis komoditinya. Begitu juga dengan status Mengganggu dan tidak Mengganggu juga belum di default, sehingga ada kemungkinan terjadi kesalahan input pada satuan/kemasan dan status barang mengganggu dan tidak mengganggu.

Seharusnya pada saat menginput jenis barang pada pilihan satuan/kemasan dan status mengganggu dan tidak mengganggu terganti otomatis sesuai dengan jenis barang yang diinput.

Contoh 1:

Saat kita memasukkan jenis barang mobil pada pilihan satuan/kemasan terganti otomatis menjadi *unitized* dan pada kolom status akan terganti secara otomatis menjadi barang mengganggu.

Contoh 2:

Saat kita memasukkan jenis barang yang mungkin terkadang menggunakan satuan/kemasan lebih dari satu misalnya semen dikolom status hanya muncul pilihan curah kering dan bag cargo (pilihan satuan/kemasan hanya yang sesuai dengan jenis komoditinya).

Kriteria

Menghindari *Creat Memo* (CM) dan pembuatan Berita Acara karena kesalahan input data.

Root Cause

Tidak melaporkan kepada pihak Sistem Informasi

Implikasi terhadap bisnis:

- Dapat terjadi kesalahan input antara komoditi dan satuan/kemasan serta ststus barang mengganggu dan tidak mengganggu.
- Dapat terjadi kesalahan penetapan tarif OPP-OPT /sharing akibat kesalahan input/entri di sistem.
- Ada indikasi terjadinya *complain* dari pelanggan karena perbedaan tarif

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

32

9. Aplikasi SIM-Barang Perlu di Sempurnakan

Rekomendasi:	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
Berkoordinasi dengan Divisi Sistem Informasi untuk melakukan penyempurnaan SIM-Barang agar dapat digunakan lebih optimal.	GM Cabang Tanjung Priok & VP Sistem Informasi 31 Desember 2021	2
Komentar Auditi: Akan dilakukan pembahasan dengan team SI terkait beberapa perubahan (CR) untuk penginputan di SIM-barang		

Lampiran 2: Rincian Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

Observasi

Dari hasil audit umum di PTP Multipurpose Terminal Cabang Tanjung Priok, kami temukan beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk peningkatan layanan, kepuasan pelanggan dan karyawan serta peningkatan kinerja cabang sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Monitoring Realisasi Bongkar Muat

Dari data Realisasi Bongkar Muat (RBM) yang diambil pada masa audit tanggal 28 Maret 2021, masih ada kegiatan yang belum di realisasikan/ status pranota belum R (Realisasi) sebagai berikut :

1. CSC ZI Hai bongkar Steel Product di kade 201 tanggal 28 Apr – 6 Mei 2016 PBM Kaluku
2. MV. Lakas bongkar GC di kade 101 tanggal 18-19 Feb 2018 PBM PT Kaluku
3. CC Sejati bongkar GC di kade 102 tanggal 24-27 Oct 2019 PBM PT Temas Port
4. MV Hong Tuan 69 bongkar Sulfur di kade 101 tanggal 11-12 feb. 2021 PBM PT Temas Port
5. MVT Symphony bongkar Steel Coils di Kade 114 tanggal 14-16 Feb 2021 PBM TJM
6. MV RI Yun bogkar GC di kade 201 tanggal 15-17 Feb 2021 PBM PT SBI

2. Sewa Lahan untuk Site Office Mitra

Dari hasil kunjungan lapangan ditemukan *site office* milik mitra yang tidak terdaftar dan belum dikenakan sewa. Pada saat kunjungan lapangan ditemukan *site office* milik PT Maritim Polykarya Tama di lapangan 002 Timur.

3. Adanya kendala dalam pengoperasian NPKTOS

Berdasarkan wawancara dengan petugas rendal/operasional dalam pengoperasian NPKTOS sejak *Go Live/ Trial* hingga hari pemeriksaan masih ditemukan kendala-kendala sebagai berikut.

- Sistem pada *Gate in* dan *Gate out* masih sering mengalami kendala jaringan dari sekitar pukul 24.00 hingga pukul 05.00 pagi.
- Pada saat menginput nama kapal di *Vessel Schedule* terkadang masih tidak muncul nomor PKK secara otomatis pada *Voyage* yang ingin dibuat sehingga petugas mengisi data *Vessel Schedule* secara manual sesuai RPK (Rencana Penambatan Kapal).

4. Alat bantu bongkar muat dalam kondisi rusak

Berdasarkan obervasi lapangan ditemukan alat bantu bongkar muat berupa terpal, jala jala lambung yang kondisinya rusak/sobek tetapi masih digunakan. Hal tersebut bisa berakibat pasir yang dibongkar jatuh ke kolam dan pada jangka waktu tertentu dapat menyebabkan pendangkalan kolam.

Selain itu ditemukan juga *Hopper* yang rusak akibat *accident* dengan truk pada saat bongkar dan belum diperbaiki sampai dengan saat audit.

Lampiran 2: Rincian Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

5. Kepatuhan Penggunaan Alat Perlindungan Diri (APD) di Area Lini I

Sehubungan dengan pemberlakuan Surat Edaran Direktur Operasi No.HM.608/4/3/1/PTP-21 tentang peraturan mengenakan APD di Aarea Lini I PT Pelabuhan Tanjung Priok yang sudah berlaku mulai 15 Maret 2021, masih banyak ditemukan pekerja yang tidak menggunakan APD di area lini I.

6. Training untuk Pekerja yang Baru Menggunakan Sistem

Tidak ada training khusus bagi pekerja yang ditugaskan untuk mengoperasikan/menggunakan system/aplikasi. Praktik yang dilakukan selama ini, *training* dilakukan oleh internal cabang).

7. Tidak Dilaporkannya user id Pekerja yang Sudah Dimutasi

Tidak ada laporan secara tertulis yang ditujukan ke Divisi Sistem Informasi terkait pencabutan *user-id* bagi pekerja yang sudah di mutase/tidak lagi bekerja di Cabang Tanjung Priok.

Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
1. Melaksanakan monitoring terhadap kegiatan RBM dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan konfirmasi kepada PBM dan menetapkan aturan batas waktu konfirmasi.	GM Cabang Tanjung Priok 31 Desember 2021	2
2. Melakukan Inventarisasi <i>site office</i> milik mitra yang ada di PT PTP Cabang Tanjung Priok untuk dilaporkan kepada Divisi Komersial dan dibuatkan perjanjian.	GM Cabang Tanjung Priok 31 Desember 2021	2
3. a. Menempatkan petugas IT (ILCS) untuk mendampingi petugas operasional cabang selama masa <i>trial</i> NPKTOS berjalan. b. Memperbaiki/mengganti perangkat IT dengan kualitas yang lebih baik dari eksisting.	GM Cabang Tanjung Priok & VP Sistem Informasi 31 Desember 2021	2
4. a. Segera memperbaiki/mengganti terpal yang rusak/tidak layak pakai, dan melakukan inventarisasi, pengawasan terhadap kondisi dan kelayakannya, serta merencanakan pembelian/penggantian sesuai prosedur. b. Memerintahkan pihak perusahaan <i>trucking</i> untuk segera memperbaiki kerusakan <i>hopper</i> yang diakibatkannya, jika perlu dibuatkan Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memperbaiki.	GM Cabang Tanjung Priok 31 Desember 2021	2

Lampiran 2: Rincian Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
5. Berkoordinasi dengan PFSO untuk melakukan patroli di Area Lini I, jika perlu menghentikan kegiatan sampai seluruh persyaratan dipenuhi	GM Cabang Tanjung Priok & VP Pengendalian Kinerja 31 Desember 2021	2
6. Berkoordinasi dengan Divisi Sistem Informasi/ILCS untuk melakukan <i>training</i> pengoperasian/penggunaan sistem/aplikasi pada pekerja yang baru ditempatkan.	GM Cabang Tanjung Priok & VP Sistem Informasi 31 Desember 2021	2
7. Berkoordinasi dengan Divisi Sistem Informasi untuk melakukan penghapusan <i>user id</i> pada pekerja yang dimutasi/tidak lagi bekerja di Cabang Tanjung Priok.	GM Cabang Tanjung Priok & VP Sistem Informasi 31 Desember 2021	2

Opini Audit	Deskripsi
1 – Adequate	Kontrol yang ada sudah cukup, sesuai, efektif, dan memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.
2 – Some Improvement Needed	Terdapat beberapa kelemahan kontrol yang teridentifikasi. Namun secara umum, kontrol yang ada sudah cukup, sesuai, efektif, dan memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.
3 – Major Improvement Needed	Terdapat banyak kelemahan kontrol yang teridentifikasi. Kontrol yang ada kemungkinan tidak dapat memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.
4 – Inadequate	Kontrol yang ada tidak cukup, sesuai, atau efektif dan tidak memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.

Prioritas	Deskripsi
1	Perbaikan perlu dilakukan segera/dalam jangka waktu singkat untuk menghindari terganggunya operasi perusahaan.
2	Perbaikan perlu dilakukan dalam tiga bulan karena berpotensi menyebabkan masalah yang serius terhadap operasi perusahaan.
3	Perbaikan dapat dilakukan dalam enam bulan. Tidak berpotensi menyebabkan masalah yang serius terhadap operasi perusahaan.